

**Analisis Peran Aparatur Pemerintah Dalam Stigma Sosial Terhadap
Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial di Panjang, Bandar Lampung**

UJIAN TENGAH SEMESTER



NURLITA SAFITRI

2216041106

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
BAB 2	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Definisi Pekerja Seks Komersial	13
2.2.2 Konsep Kebijakan Pekerja Seks Komersial.....	14
2.2.3 Stigma Sosial Terhadap PSK.....	15
2.3 Teori.....	17
2.1 Kerangka Pikir.....	18
KERANGKA PIKIR	19
BAB 3	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4 Teknik Analisis Data	22
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	22
BAB 4	24
HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Sejarah Pekerja Seks Komersial (PSK)	24
4.3 Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial (PSK).....	27
4.4 Hasil Penelitian.....	29
BAB 5	32
KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stigma sosial adalah stereotip atau persepsi yang tidak baik yang diasosiasikan kepada orang atau kelompok tertentu, termasuk pekerja seks komersial, yang berujung pada pengucilan sosial, marginalisasi, dan diskriminasi. Disini peran aparaturnya pemerintah sangat penting untuk menangani dan mengatasi stigma sosial dalam kesejahteraan bagi para pekerja seks komersial.

Prostitusi dianggap sebagai kelainan sosial dalam bidang ilmu sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini, masyarakat memberikan stigma yang sangat buruk tidak hanya pada pekerja seks komersial itu sendiri tetapi juga pada keturunan mereka. Anak-anak dari pekerja seks komersial sering diasosiasikan secara tidak baik oleh masyarakat karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang berbahaya bagi anak-anak lain.

Karena ekonomi Indonesia yang masih rapuh, "mereka" beralih ke seks untuk mengisi pundi-pundi rupiah. Wanita berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan pria dalam perekonomian. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan yang melibatkan seks selalu dipegang oleh perempuan. Orang yang melakukan pekerjaan ini dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK) di masyarakat. Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial selalu berada pada posisi yang sangat rawan.

Lapangan pekerjaan saat ini merupakan salah satu tantangan sosial, seperti yang kita ketahui bersama. Pertumbuhan kriteria kualifikasi pekerjaan membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya jumlah posisi yang sesuai dengan tingkat pendidikan setiap tahunnya. Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah salah satu cara sederhana bagi para pekerja wanita dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah untuk mewujudkan impiannya untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Hurri & Mulyadi).

Pelacuran dipandang sebagai pelanggaran moral di Indonesia. Prostitusi, menurut Gagnon (1968), adalah tindakan menawarkan layanan seksual dengan imbalan produk atau uang tunai. Ia memandang prostitusi sebagai fenomena dalam masyarakat di mana perempuan menjual diri mereka kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan bantuan atau akses

seksual sebagai cara untuk bertahan hidup. Pekerja seks komersial merupakan fenomena yang muncul dari berbagai masalah yang kompleks, seperti prospek ekonomi yang terbatas, ketidakmampuan untuk memilih pilihan lain, dan inisiatif pemerintah yang tidak terfokus dengan baik sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan (Ekberg, 2004) (Persada, 2021).

Sebagian masyarakat percaya bahwa tempat prostitusi hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian karena profesi prostitusi sering dihubungkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dengan penyakit masyarakat yang mengganggu ketertiban dan keindahan (Nawir, 2018). Masyarakat kemudian melabeli keturunan pekerja seks komersial karena mereka percaya bahwa hal ini akan menimbulkan kecaman.

Meskipun prostitusi merupakan hal yang ilegal karena melanggar moral, agama, dan budaya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan profesional (Bawole, 2013). Isu prostitusi di masyarakat bukanlah hal yang baru, banyak anak muda yang dieksploitasi dan akhirnya terjerumus ke dalam industri prostitusi. Sekitar 150.000 anak menjadi korban eksploitasi, menurut Sumadi Wijaya dari Tim Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Hidayat, 2019). Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 68, yaitu: Perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial anak secara khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, serta bantuan hukum (Utami & Wadjo, 2021).

Seorang pekerja seks komersial tidak diragukan lagi dianggap tidak baik di setiap lapisan masyarakat, dan persepsi ini tidak hanya berlaku untuk individu itu sendiri tetapi juga untuk keluarga mereka. Penilaian masyarakat terhadap sesuatu atau seseorang didasarkan pada persepsi visual dan pendengaran. Penilaian dapat dilakukan terhadap hal-hal selain yang dapat dilihat atau didengar, seperti orang atau benda lain. Ada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap benar atau salah dan dinilai oleh masyarakat secara individual. Penilaian ini juga dapat mempertimbangkan posisi atau bidang pekerjaan seseorang, tanpa memandang jenis kelamin.

Masyarakat umum memiliki pandangan yang kurang baik terhadap anak-anak pekerja seks komersial karena anak-anak tersebut tinggal atau ikut dengan ibunya ke tempat lokalisasi, di mana mereka menjadi terbiasa melihat aktivitas di tempat lokalisasi. Anak-anak pekerja seks komersial mendapat stigma karena masyarakat merasa bahwa mereka pasti memiliki moral yang lemah.

Teori stigma Erving Goffman menyatakan bahwa stigma sosial muncul ketika seseorang dicap negatif karena dianggap berada di luar norma-norma masyarakat. Perilaku, identitas, dan kesejahteraan seseorang dapat dipengaruhi oleh stigma sosial. Stigmatisasi sosial terhadap PSK dapat membahayakan kesejahteraan mereka dan memperburuk keadaan sosial ekonomi mereka yang sudah sulit.

Stigma sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik PSK. Mereka mungkin merasa malu atau tidak nyaman untuk mencari bantuan kesehatan karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka. Stigma sosial juga dapat mempengaruhi hubungan sosial PSK dengan keluarga, teman, dan masyarakat umum. Mereka mungkin diasingkan atau dijauhi oleh orang-orang terdekat mereka karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial terhadap PSK dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pekerjaan. Beberapa PSK mungkin merasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut karena kurangnya alternatif pekerjaan yang tersedia, sementara yang lain mungkin memilih pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi. Stigma sosial juga dapat mempengaruhi perilaku dan praktik seksual PSK. Mereka mungkin merasa sulit untuk mencari informasi atau bantuan terkait kesehatan seksual dan reproduksi karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial juga dapat mempengaruhi keamanan PSK. Mereka mungkin menjadi target kekerasan atau eksploitasi karena kurangnya perlindungan hukum dan sosial yang tersedia bagi mereka. Stigma sosial terhadap PSK dapat menjadi penghalang dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PSK seringkali mengalami kesulitan dalam mengatasi stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial terhadap PSK juga dapat berdampak pada masalah keamanan publik. Terkadang, PSK harus bekerja di tempat-tempat yang tidak aman, seperti di jalanan atau tempat-tempat terpencil. Stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka dapat membuat mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan atau kekerasan.

PSK sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan keselamatan, seperti kondom atau obat-obatan untuk mencegah atau mengobati penyakit menular seksual. Stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka dapat membuat mereka malu atau takut untuk mencari layanan kesehatan tersebut.

Stigma sosial terhadap PSK juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. PSK mungkin tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap kontrasepsi, atau merasa sulit untuk mencari bantuan medis saat mengalami masalah kesehatan reproduksi. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mereka secara keseluruhan.

Keterbatasan dalam upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap PSK dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. PSK mungkin tidak dapat memanfaatkan program pendidikan atau pelatihan pekerjaan yang tersedia, atau tidak diizinkan mengakses pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan sosial.

Prostitusi merupakan masalah bagi masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya, merusak moral bangsa, dari sifat materialisme hingga kemajuan teknologi, aspek globalisasi zaman memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap prostitusi, masih banyak lokasi prostitusi legal di setiap daerah karena keterlibatan pemerintah dalam menangani prostitusi masih kurang.

Meskipun stigma sosial terhadap PSK masih sangat kuat, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Beberapa LSM dan kelompok aktivis telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan membawa perubahan sosial terhadap stigma sosial terhadap PSK. Selain itu, beberapa program telah dirancang untuk membantu PSK meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti program pelatihan keterampilan atau dukungan kesehatan

Masyarakat kelas menengah ke bawah terkena dampak dari kesulitan sosial ekonomi. Masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat berkembang sebagai akibat dari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jika masalah pekerjaan dibagi atau diklasifikasikan menjadi masalah pekerjaan laki-laki dan perempuan, maka akan timbul masalah. Pekerjaan itu sendiri akan menimbulkan masalah bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian kelas terlihat jelas pada pilihan karir dan kesempatan yang masih terbatas dalam setiap kesempatan kerja, terutama bagi karyawan perempuan.

Mengingat sulitnya melacak penyebab masalah sosial ini dan hambatan yang ditimbulkan oleh selera manusia yang tidak pernah terpuaskan, maka hal ini menjadi sangat menantang untuk diatasi. Manusia memiliki dorongan seksual yang tidak pernah terpuaskan. Ketika berbicara tentang seks, moral dan prinsip menjadi hal yang tidak terlalu penting.

Sejarah PSK dimulai sejak masa kuno di berbagai negara di dunia, seperti Yunani dan Mesir Kuno. Pekerja seks dalam sejarah kuno sering dianggap sebagai orang yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama. Di Eropa, pada abad ke-15, pemerintah di beberapa negara mulai memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas seksual. Perempuan yang melanggar undang-undang tersebut sering dihukum dengan mengenakan tanda-tanda yang menandakan bahwa mereka adalah pelacur.

Di Inggris, pada awal abad ke-18, prostitusi sering diatur oleh pemerintah. Pekerja seks diharuskan untuk mendaftar dan membayar pajak, serta ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Di Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19, kegiatan prostitusi menjadi sangat berkembang di kota-kota besar seperti New York dan Chicago. Dalam beberapa kasus, perempuan yang terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai korban dan tidak dihukum.

Selama Perang Dunia II, banyak pasukan tentara yang melakukan hubungan seks dengan pekerja seks yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia bahkan membuka rumah bordil khusus untuk pasukan mereka. Seiring perkembangan zaman, kegiatan prostitusi semakin berkembang di berbagai negara di dunia. Meskipun ada beberapa negara yang mengatur prostitusi dan melindungi hak-hak pekerja seks, banyak negara yang masih melarang kegiatan tersebut dan menganggapnya sebagai kejahatan.

Di Indonesia, pekerja seks mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, banyak wanita pribumi yang dijadikan pelacur oleh para tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, prostitusi semakin berkembang dan pada tahun 1967, pemerintah Indonesia melarang kegiatan prostitusi.

Dalam beberapa kasus, perdagangan seks dipaksa melalui perbudakan seksual. Dalam situasi ini, orang-orang dipaksa untuk menjadi PSK dengan ancaman atau tindakan kekerasan, atau dengan memberi mereka obat-obatan terlarang. Banyak korban perdagangan seks di seluruh dunia berasal dari negara-negara miskin atau daerah yang terkena konflik, dan sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, serta terpapar risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Sejak lama, isu prostitusi dan perdagangan seks telah menjadi topik kontroversial dalam berbagai negara. Beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Nevada di Amerika Serikat, telah melegalkan prostitusi, sementara negara lain, seperti Swedia dan Prancis, telah mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap perdagangan seks dan memperketat hukuman bagi pelaku. Meskipun legalisasi prostitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja seks, masih ada pertentangan dan kontroversi dalam pengaturannya.

Prostitusi termasuk dalam wilayah patologi sosial, seperti halnya apa yang saat ini disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelanggaran sosial selalu terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan secara bebas maupun tidak. Karena fenomena ini sudah ada sejak awal peradaban manusia, maka tidak ada kebudayaan yang dapat menghindarinya. Interaksi sosial di antara anggota kelompok terkadang dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam budaya tersebut.

Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerjaan yang menyedihkan dalam hal pendidikan. PSK adalah pekerjaan yang merendahkan perempuan dalam hal kemanusiaan. Dari segi ekonomi, prostitusi di dunia nyata sering kali mengarah pada pemerasan tenaga kerja. Dari sisi medis, prostitusi merupakan metode yang sangat efisien untuk penyebaran penyakit ginekologi dan kelamin yang berbahaya. Dari sudut pandang kamtibmas, prostitusi merupakan praktik yang dapat mengakibatkan tindak kriminalitas. Prostitusi dapat mengurangi estetika dan kualitas lingkungan perkotaan dari sudut pandang tata kota. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan mengambil sikap yang manusiawi.

Interaksi manusia, seperti yang diketahui secara umum, mencakup interaksi dengan lingkungan dan interaksi satu sama lain. Interaksi dengan lingkungan, dalam arti luas, dapat merujuk pada bagaimana anggota suatu komunitas terlibat dengan beragam budaya, cara hidup, dan karakteristik regional yang lazim di negara tempat komunitas tersebut bernaung. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk kondisi moneter, situasi keamanan, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Banyak LSM dan kelompok aktivis telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah yang dihadapi oleh PSK dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk organisasi yang berfokus pada hak-hak pekerja seks, seperti International Union of Sex Workers dan Sex Workers Outreach Project, serta LSM yang lebih luas yang mendukung hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Terkait prostitusi, pemerintah telah membuat banyak peraturan dan undang-undang. Untuk menemukan solusi atas masalah ini, organisasi-organisasi internasional juga telah mendukung gerakan-gerakan perempuan. Meskipun demikian, mayoritas gerakan perempuan di seluruh dunia masih dipimpin oleh perempuan borjuis yang tidak peduli dengan keterampilan atau pengalaman perempuan proletar dalam memperjuangkan kesetaraan. (Nur & Mukramin, 2023)

Di Indonesia sendiri, perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Untuk melindungi perempuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyelundupkan mereka untuk dijual dan digunakan sebagai PSK, kelompok-kelompok swadaya masyarakat perempuan telah bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di daerah-daerah. Namun, ketika mereka memilih untuk menjadi PSK, segalanya akan berbeda. Sosialisasi dan konseling saja tidak dapat mengakhiri siklus prostitusi. Mereka membutuhkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.(Balai et al., n.d.)

Kebijakan publik menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, maka sangat penting bahwa kebijakan publik harus dapat mengatasi masalah-masalah yang perlu diatasi selama pembuatan dan pelaksanaannya. Karena kebijakan publik mempengaruhi kepentingan seluruh masyarakat, maka kebijakan publik diakui sebagai isu yang krusial. Menurut Thomas Dye, ia menegaskan bahwa ia percaya kebijakan publik digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.(Islam et al., 2019)

Dalam upaya memahami dan mengerti suatu kondisi yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan, permasalahan yang muncul di masyarakat menjadi sebuah konstruksi diskusi yang bertujuan untuk menghasilkan solusi melalui berbagai jenis pertanyaan tentang bagaimana isu dan masalah disusun dan didefinisikan. Menurut penilaian Thomas Dye dalam Rian Nugroho:

“Kebijakan publik itu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda “(what government do, why they do it, and what difference it makes.”

Untuk mencapai kebaikan bersama, atau kepentingan seluruh masyarakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan di semua bidang kehidupan. Dalam hal ini, kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Woll yang dikutip oleh Tangkilisan, *"kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat."*

Kebijakan publik bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga menerima masukan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mengontrol semua nilai yang dipengaruhi oleh pemerintah.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan untuk mengontrol setiap nilai yang menjadi pertimbangan sebuah kebijakan. Lembaga swadaya masyarakat ini didirikan oleh anggota masyarakat yang ingin membuat sebuah fasilitas dengan fokus penelitian yang spesifik agar kebijakan publik dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya satu aspek saja. Kebijakan publik tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi harus mampu mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari.

Pandangan Masyarakat terhadap Strategi Politik untuk Menyelesaikan Masalah Sosial Pemerintah juga harus memperhatikan penyelesaian masalah sosial seperti pembinaan untuk menciptakan keluarga yang damai. Hal ini karena salah satu pilar masyarakat yang mempengaruhi kualitas generasi adalah keluarga. Untuk memastikan bahwa penduduknya memiliki otak dan keterampilan yang dibutuhkan, negara harus menjamin pendidikan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedua yang telah disebutkan di atas, yaitu agar setiap orang dapat bekerja secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan dan halal.

1.2 Fokus Penelitian

Pada makalah ini penelitian yang saya gunakan fokus kepada bagaimana para aparatur pemerintah berkontribusi dan memperbaiki kesejahteraan stigma sosial terhadap pekerja seks komersial. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan terhadap bagaimana masyarakat memandang pekerja seks komersial sehubungan dengan hukum dan pembatasan yang diterapkan pemerintah terhadap mereka. Dan juga pemerintah disini berdedikasi untuk menjadi penyambung jembatan bagi masyarakat sehingga tindakan yang kurang mengenakan terhadap PSK bisa segera diatasi, agar para mantan PSK ini juga bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial dan meningkatkan kesejahteraan mereka?
2. Bagaimana stigma sosial terhadap pekerja seks komersial terbentuk di masyarakat?
3. Bagaimana stigma sosial terhadap pekerja seks komersial mempengaruhi kesejahteraan mereka?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perwakilan pemerintah berkontribusi terhadap stigma sosial yang diberikan kepada pekerja seks komersial dan bagaimana stigma tersebut mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tujuan penelitian ini juga mencakup penilaian terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi stigma masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

Selain itu, dapat pula diidentifikasi program dan kebijakan yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang program dan kebijakan tersebut dengan cara mengevaluasi upaya pemerintah dalam memerangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

1.5 Manfaat Penelitian

Memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi kesehatan pekerja seks komersial. Dengan memahami dampak stigma sosial terhadap kesejahteraan pekerja seks komersial, kita dapat menargetkan upaya-upaya untuk meningkatkan akses pekerja seks komersial terhadap sumber daya kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.

Diperlukan juga penilaian terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi stigma masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial. Dengan mengevaluasi upaya pemerintah dalam memerangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial, dapat diidentifikasi program dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program dan kebijakan tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dan dalam penelitian ini saya menggunakan strategi yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, esai, jurnal, dan materi terkait lainnya. Tujuan dari

tinjauan literatur ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran aparat pemerintah dalam pengembangan dan pemeliharaan stigma sosial terhadap pekerja seks komersial.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian lain yang dilakukan sebagai pembanding, pelengkap, dan sumber bahan kajian. Sebagai pelengkap, pembanding, dan sumber bahan kajian. Beberapa temuan dari penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti antara lain:

Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online adalah sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Melinda Arsanti dari Universitas Mulawarman. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pekerja seks komersial memasarkan layanan mereka melalui media sosial. Menurut temuan penelitian ini, penutupan sejumlah tempat prostitusi oleh pemerintah adalah penyebab utama dari perpindahan industri prostitusi. Selain itu, industri seks komersial percaya bahwa media sosial adalah alat yang sangat baik untuk mempromosikan industri prostitusi.

Presentasi Diri Seorang Pekerja Seks Komersial (Studi Kualitatif Metode Dramaturgi Mengenai Presentasi Diri Seorang Pekerja Seks Komersial di Saritem) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ryandy Purnawan di Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai presentasi diri pekerja seks komersial di Saritem Bandung. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana dramaturgi memaknai presentasi diri seorang pekerja seks komersial di Saritem Bandung. Dilihat dari sudut pandang dramaturgi. Temuan penelitian ini mengenai pekerja seks komersial di Saritem Bandung memiliki presentasi yang sangat baik.

Penelitian berjudul Ayam Kampus Kota Medan dengan Analisis Teori diterbitkan pada tahun 2008 oleh Elfrida Grace dari Universitas Sumatera Utara. Tahun 2008 dengan judul Ayam Kampus Kota Medan dengan Analisis Teori Dramaturgi (Studi Kasus Pada Seorang Mahasiswa di Kota Medan yang Menjadi "Ayam Kampus"). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyimpangan sosial yang terjadi pada mahasiswi yang mahasiswi yang rutin menjadi ayam kampus sebagai upaya untuk

mengetahui berbagai jenis penyimpangan yang terjadi di lingkungannya, variasi tambahan yang terjadi dalam komunitas ayam kampus, dan untuk mengetahui mengetahui tingkat indeks prestasi ayam kampus. Kebutuhan dalam komunitas ayam kampus merupakan salah satu variabel yang diidentifikasi oleh temuan penelitian sebagai pendorong mahasiswi menjadi ayam kampus. Di antaranya adalah permintaan di zaman sekarang akan ayam kampus. Karena penampilan dan kehidupannya yang sama dengan mahasiswi lainnya, semakin sulit untuk menebak apakah ada ayam kampus. Harga ditentukan oleh Mahasiswi di kampus yang menjadi ayam kampus berbeda dengan kupu-kupu malam di lokalisasi dan tempat prostitusi lainnya.

"Interaksi sosial antara pekerja seks komersial (PSK) dengan keluarganya" adalah judul penelitian tesis Subhi Azis Suryadi pada tahun 2011, yang juga berjudul "Interaksi sosial antara pekerja seks komersial (PSK) dengan masyarakat". Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Jumlah partisipan penelitian sebanyak 14 orang, termasuk 5 orang pekerja seks komersial, 5 orang masyarakat, dan 4 orang informan. sebagai subjek, dan empat orang sebagai informan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada gesekan atau perselisihan antara pekerja seks komersial dan masyarakat setempat, dan kedua kelompok ini hidup rukun. Keberadaan PSK memberikan dampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Dari sisi sosiologis dapat merusak sendi-sendi moral dan agama masyarakat sekitar, dari sisi pendidikan dapat merusak generasi penerus, dari sisi kewanitaan berdampak pada merosotnya harkat dan martabat wanita, dan dari sisi kesehatan sangat efektif sebagai sumber penyakit menular. Dari sisi kamtibmas, dapat menimbulkan tindak kriminalitas, rawan pencurian yang sering meresahkan warga sekitar, bahkan rawan pembunuhan. Dari sisi kesehatan, sangat berpotensi sebagai lokasi penyebaran penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS. Tidak hanya kecenderungan pembunuhan.(Putri & Syafruddin, 2020).

Sementara itu, beberapa penelitian menekankan faktor struktural tambahan, seperti kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan kerja yang membantu keluarga miskin mengatasi kerentanan mereka, nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat terhadap prostitusi (sikap permisif atau acuh tak acuh), tidak adanya atau kurangnya peraturan dan penegakan hukum yang efektif

untuk mencegah atau mengatasi pertumbuhan industri pariwisata dan hiburan, serta korupsi dan konflik kepentingan di antara para pembuat kebijakan, pemilik, dan militer, pemerintah, dan aparat penegak hukum, menjadikannya semakin sulit untuk mengontrol atau melarang prostitusi (Lim, 1998).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain sebagai pekerjaan atau bisnis, dengan keseimbangan uang atau barang. PSK sering kali dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang kontroversial dan seringkali ilegal di banyak negara. PSK dapat bekerja di berbagai tempat, termasuk di jalanan, di rumah bordil, di klub malam, atau melalui layanan online. Beberapa PSK bekerja secara mandiri, sedangkan yang lain bekerja untuk pihak ketiga seperti agen atau pengelola rumah bordil.

Meskipun PSK sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak etis atau bahkan merugikan, beberapa kelompok advokasi berpendapat bahwa PSK harus diakui sebagai pekerjaan yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Kelompok ini berpendapat bahwa pengakuan ini akan membantu mengurangi kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh PSK, serta meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan sosial yang diperlukan.

Pelacuran/prostitusi merupakan penyakit sosial yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat dan keberadaannya bagaikan bayang-bayang kehidupan manusia itu sendiri. Dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan baik jumlah PSK maupun bentuk-bentuk pelacuran/prostitusi itu sendiri. Tercatat ada 155.478 PSK di dunia pada tahun 2010. PSK di Indonesia diperkirakan berjumlah 155.478 orang berdasarkan data yang dikumpulkan dari jumlah PSK yang terjaring razia penegak hukum dan terdata di lokalisasi. Menurut para pejabat, jumlah PSK di Indonesia diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Perkiraan tahun 2011 menyebutkan jumlah pelacur mencapai 197.000 orang.

Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki banyak lokasi wisata yang populer baik bagi pengunjung domestik maupun internasional, serta tingkat budaya dan ekonomi yang sangat beragam, yang menjadikan Provinsi Lampung sebagai lokasi yang sangat potensial untuk pertumbuhan prostitusi. Menurut Lembaga Advokasi Anak Lampung (Lada), terdapat banyak kasus anak-anak dan remaja yang terlibat dalam prostitusi di Bandar Lampung¹⁹. Abdul Hakim, seorang anggota DPR RI, prihatin dengan tingginya prevalensi prostitusi anak di Lampung. Di Lampung, beberapa LSM anak menemukan bahwa terdapat 250 pekerja seks anak dalam dua tahun terakhir.

Dalam dua tahun terakhir, LSM Children Crisis Center (CCC) dan Lembaga Advokasi Anak (LADA) Lampung telah membantu lebih dari 250 anak atau remaja yang menjadi klien prostitusi. Operasi prostitusi anak di Lampung berupa dalam bentuk Pornografi, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual. PSK anak biasanya melakukan kegiatannya dengan membuat film porno menjual gambar-gambar yang bersifat eksplisit. Mengenai kategori eksploitasi seksual, PSK anak memiliki pangkalan dan mucikari, sama seperti PSK lainnya.

Menurut LADA dan CCC, anak-anak dan remaja ini terlibat dalam prostitusi karena gaya hidup dan situasi keuangan mereka. Karena kondisi kehidupan dan kemiskinan mereka, anak-anak dan remaja beralih ke prostitusi. Anak-anak dan remaja ini dipaksa masuk ke dalam pelacuran sebagai cara untuk mendapatkan gaya hidup yang mereka inginkan. Anak-anak dan remaja sering melacurkan diri untuk mendapatkan uang dengan cepat dan metode yang sederhana.

2.2.2 Konsep Kebijakan Pekerja Seks Komersial

Pengaruh Stigma Sosial terhadap Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial di Daerah Panjang, Bandar Lampung merupakan fenomena yang kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari PSK. Stigma sosial dapat didefinisikan sebagai stereotip atau pandangan negatif yang melekat pada kelompok atau individu tertentu, termasuk PSK, yang berakibat pada diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi sosial.

Stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung mengakibatkan banyak masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. PSK seringkali dianggap sebagai sumber masalah sosial dan diisolasi dari masyarakat. Mereka sering menghadapi diskriminasi dalam hal mencari pekerjaan, akomodasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. PSK juga rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, serta terpapar risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Para mantan PSK yang ingin tinggal di komunal sekali lagi ingin harga diri mereka kembali seperti sebelum mereka menjadi PSK. Salah satu lokasi yang pernah menawarkan mantan PSK dengan pembinaan, khususnya Dinas Sosial Wilayah Lampung. Dengan bantuan aplikasi Exceed (Eliminate Exploitative) Tahun 2010 merupakan peluncuran program "Pekerja Anak melalui Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi" di Lampung. Tahun 2010, Lampung Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan di sana, terlihat bahwa PSK yang berusia antara 34 dan 40 tahun mendominasi.

PSK yang berdomisili di lokasi eks lokasi Kelurahan Panjang Selatan berjumlah 58 orang, atau 59,18% dari seluruh PSK yang ada. PSK yang ada. Berikutnya adalah PSK yang berusia antara 25 tahun. Sebanyak 25 orang atau 25,51% dari seluruh PSK yang ada, berusia antara 18 dan 33 tahun. Sebanyak 15 orang atau 15,31% dari seluruh PSK yang ada saat ini masih aktif dan berusia di bawah 25 tahun. Ada beberapa PSK yang tercantum di atas yang sudah tidak lagi menjadi wanita penghibur dengan memutuskan untuk menikah dan bergabung kembali dengan masyarakat.

2.2.3 Stigma Sosial Terhadap PSK

Stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. PSK seringkali mengalami perasaan tidak aman, takut, dan tertekan akibat stigma yang mereka hadapi. Stigma sosial juga dapat menghambat kemampuan PSK untuk memperbaiki situasi mereka dan mengejar aspirasi yang lebih baik.

Upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung dapat mencakup pendekatan yang bersifat edukatif dan intervensi sosial. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan kebutuhan PSK perlu ditingkatkan. Langkah-langkah seperti program pengurangan risiko kesehatan dan pendidikan kesehatan seksual juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan PSK.

Namun, mengatasi stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung tidak dapat dianggap mudah. Upaya ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, LSM, dan kelompok aktivis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak dan kesejahteraan PSK.

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa stigma sosial terhadap PSK tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Stigma sosial dapat memperburuk masalah sosial dan kesehatan yang terkait dengan pekerjaan seks komersial, seperti penyebaran HIV/AIDS dan kekerasan dalam hubungan intim.

Oleh karena itu, pemerintah dan LSM di Daerah Panjang, Bandar Lampung perlu bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang mendukung hak-hak dan kesejahteraan PSK. Upaya-upaya ini dapat meliputi perlindungan hukum, peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, dan program rehabilitasi untuk PSK yang ingin keluar dari industri seks.

Ketika stigma sosial terhadap PSK dihilangkan atau ditekan, PSK dapat merasakan kebebasan dan kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. PSK dapat mencari pekerjaan yang lebih stabil dan menerima perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung tidak hanya merugikan PSK itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, penting untuk membangun kesadaran dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan stigma sosial terhadap PSK. Pendekatan ini dapat melibatkan kampanye publik dan media, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberian pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan kerja yang dapat membantu PSK untuk keluar dari pekerjaan seksual komersial.

Penting juga untuk memahami bahwa penghapusan stigma sosial terhadap PSK tidak dapat terjadi dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dalam hal ini, penting untuk tetap memperhatikan peran dan kesejahteraan PSK dan memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi dalam setiap tahap perubahan sosial dan kebijakan yang dilakukan.

2.3 Teori

Berbagai teori dapat digunakan untuk memahami pengaruh stigma sosial terhadap kesejahteraan pekerja seks komersial (PSK) di Daerah Panjang, Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan:

- Teori Stigma (Erving Goffman) - Teori ini menyatakan bahwa stigma sosial terjadi ketika seseorang dianggap berbeda dari norma sosial dan kemudian diberikan label yang merendahkan. Stigma sosial dapat mempengaruhi perilaku, identitas, dan kesejahteraan individu. Dalam kasus PSK, stigma sosial dapat menghambat kesejahteraan mereka dan memperparah kondisi sosial dan ekonomi yang sudah sulit.
- Teori Sosial Konstruksi (Peter Berger dan Thomas Luckmann) - Teori ini mengemukakan bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi sosial bersama. Dalam konteks PSK, stigma sosial terhadap mereka terbentuk oleh konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma sosial, nilai, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat.
- Teori Perilaku Sosial (Albert Bandura) - Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan faktor psikologis. Dalam kasus PSK, perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh stigma sosial yang mereka hadapi. Stigma sosial dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, dan membangun hubungan sosial yang sehat.
- Teori Feminisme (bell hooks) - Teori ini menyoroti bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Dalam kasus PSK, stigma sosial terhadap mereka seringkali didorong oleh

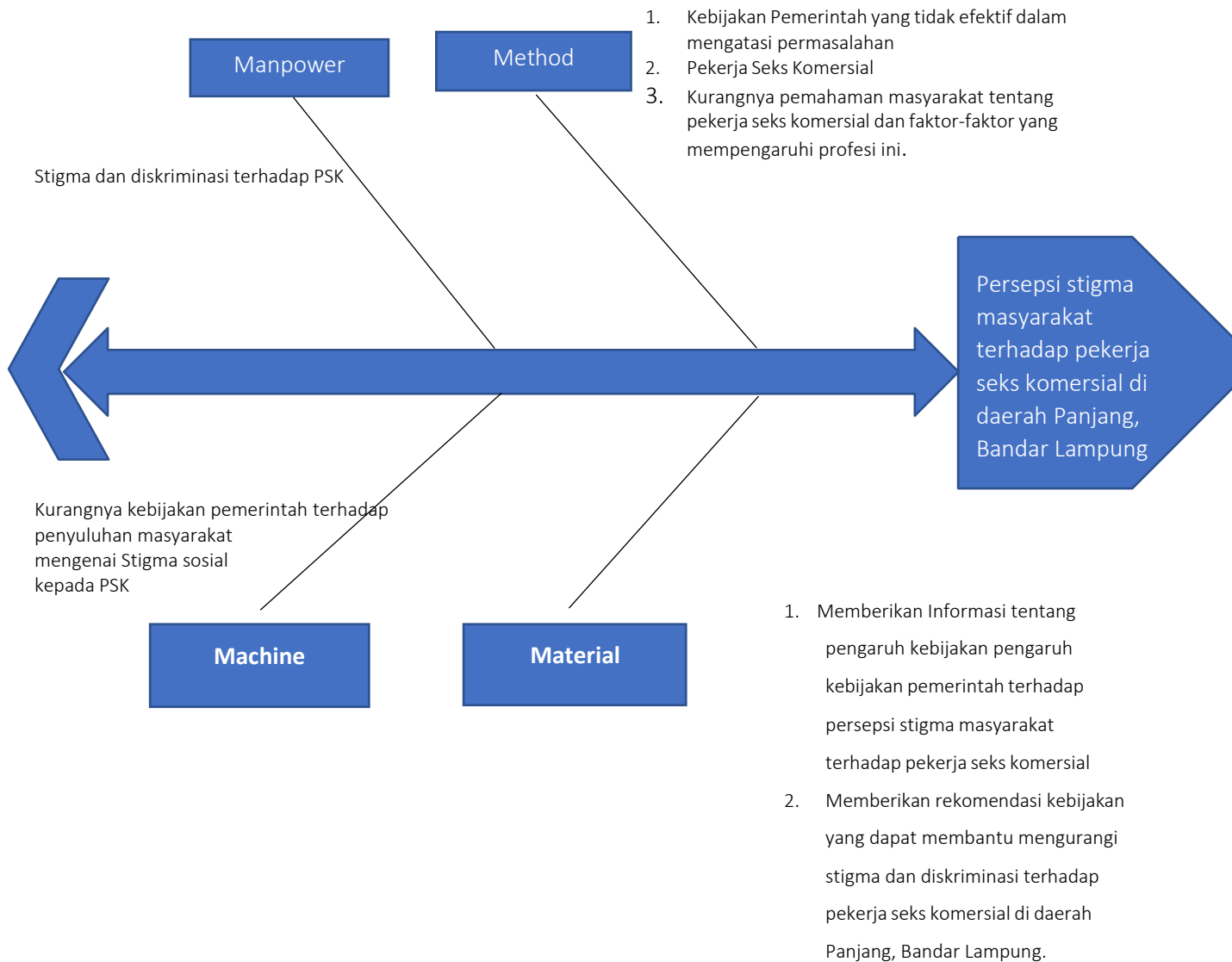
stereotip gender yang memandang perempuan yang bekerja di industri seksual sebagai pelacur dan tidak bermartabat.

- Teori Hukum dan Keadilan (John Rawls) - Teori ini menyatakan bahwa masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mencapai kesejahteraan yang adil. Dalam kasus PSK, stigma sosial dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak asasi manusia yang lain, yang berdampak pada kesejahteraan mereka yang tidak adil.
- Teori Penindasan (Paulo Freire) - Teori ini mengemukakan bahwa penindasan terjadi ketika satu kelompok memegang kekuasaan yang lebih besar daripada kelompok lain dan menggunakan kekuasaan itu untuk mengontrol dan menindas kelompok yang lebih lemah. Dalam kasus PSK, stigma sosial terhadap mereka seringkali didorong oleh kuasa sosial dan ekonomi yang lebih besar yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah, yang mempengaruhi kesejahteraan mereka secara negatif.

2.1 Kerangka Pikir

Bagian ini berisi interpretasi hasil analisis dan pembahasan temuan yang ditemukan. Pada bagian ini, penulis harus menuliskan secara rinci tentang temuan yang ditemukan dari hasil analisis dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada tinjauan pustaka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penulis adalah untuk melihat bagaimana peran kebijakan pemerintah dapat merubah stigma sosial masyarakat kepada para PSK. (*PENGLOLAAN KESAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI MEDIA SOSIAL (Studi Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Kota Bandar Lampung Di Twitter)*, n.d.)

KERANGKA PIKIR



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk mengetahui secara detail mengenai Analisis Peran Aparatur Pemerintah Dalam Stigma Sosial Terhadap Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial di Panjang, Bandar Lampung, dapat dilakukan pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini lebih fokus pada makna dan interpretasi dari data yang diperoleh, daripada pada pengukuran dan penghitungan statistik. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik.

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, yaitu dengan mencari pola dan tema yang muncul dari data tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengembangkan teori atau konsep baru, atau untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena sosial yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman (1994), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari subjek dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Analisis Peran Aparatur Pemerintah Dalam Stigma Sosial Terhadap Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial di Panjang, Bandar Lampung adalah untuk memahami dampak stigma sosial pada kehidupan sehari-hari PSK dan kesejahteraan mereka di daerah tersebut.

Penelitian ini akan melihat bagaimana stigma sosial mempengaruhi akses PSK terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman PSK dengan stigma sosial dan bagaimana stigma ini mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Fokus penelitian juga akan membahas upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi stigma sosial terhadap PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung dan evaluasi terhadap

keberhasilan upaya tersebut. Data ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (perorangan) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data primer bisa didapatkan dari kegiatan wawancara dan observasi yang sudah dipaparkan pada baris sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada ataupun yang dimiliki peneliti dari catatan penelitian sebelumnya, bukti yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengutip pernyataan para ahli yang mengetahui secara jelas mengenai kajian-kajian yang ada dalam penelitian yang akan peneliti susun ini. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data yang akan peneliti gunakan dari sumber literatur berupa buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 238).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 135).

Alasan peneliti menggunakan metode pengambilan data ini adalah karena peneliti ingin memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman hidup seseorang yang tidak dapat diobservasi secara langsung

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya (Ruslan, 2006: 221).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dapat digunakan antara lain analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan situasi terkait stigma sosial, analisis regresi untuk melihat hubungan antara stigma sosial dan kesejahteraan PSK, analisis faktor untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi stigma sosial dan kesejahteraan PSK, dan analisis konten untuk menganalisis data kualitatif seperti hasil wawancara dan diskusi kelompok terkait persepsi dan pengalaman PSK terkait stigma sosial. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis multivariat untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stigma sosial dan kesejahteraan PSK di Daerah Panjang, Bandar Lampung.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, cara pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian (Moleong, 2007) dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan atau pengamatan, ketekunan pengamatan dalam penelitian, triangulasi, kecukupan refensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.

Cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data pada penelitian Pengaruh Stigma Sosial terhadap Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial di Daerah Panjang, Bandar Lampung. Pertama, dapat dilakukan uji validitas data dengan menggunakan

teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data yang berbeda.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Pekerja Seks Komersial (PSK)

Sejarah PSK dimulai sejak masa kuno di berbagai negara di dunia, seperti Yunani dan Mesir Kuno. Pekerja seks dalam sejarah kuno sering dianggap sebagai orang yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama. Di Eropa, pada abad ke-15, pemerintah di beberapa negara mulai memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas seksual. Perempuan yang melanggar undang-undang tersebut sering dihukum dengan mengenakan tanda-tanda yang menandakan bahwa mereka adalah pelacur.

Di Inggris, pada awal abad ke-18, prostitusi sering diatur oleh pemerintah. Pekerja seks diharuskan untuk mendaftar dan membayar pajak, serta ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Di Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19, kegiatan prostitusi menjadi sangat berkembang di kota-kota besar seperti New York dan Chicago. Dalam beberapa kasus, perempuan yang terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai korban dan tidak dihukum.

Selama Perang Dunia II, banyak pasukan tentara yang melakukan hubungan seks dengan pekerja seks yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia bahkan membuka rumah bordil khusus untuk pasukan mereka. Seiring perkembangan zaman, kegiatan prostitusi semakin berkembang di berbagai negara di dunia. Meskipun ada beberapa negara yang mengatur prostitusi dan melindungi hak-hak pekerja seks, banyak negara yang masih melarang kegiatan tersebut dan menganggapnya sebagai kejahatan.

Di Indonesia, pekerja seks mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, banyak wanita pribumi yang dijadikan pelacur oleh para tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, prostitusi semakin berkembang dan pada tahun 1967, pemerintah Indonesia melarang kegiatan prostitusi.

Meskipun kegiatan prostitusi dilarang di Indonesia, tetapi praktik prostitusi masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Panjang, Bandar Lampung. Saat ini, isu prostitusi menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Banyak organisasi dan

kelompok aktivis yang berjuang untuk melindungi hak-hak pekerja seks dan menghapus stigma sosial yang melekat pada mereka.

Dalam beberapa kasus, perdagangan seks dipaksa melalui perbudakan seksual. Dalam situasi ini, orang-orang dipaksa untuk menjadi PSK dengan ancaman atau tindakan kekerasan, atau dengan memberi mereka obat-obatan terlarang.

Banyak korban perdagangan seks di seluruh dunia berasal dari negara-negara miskin atau daerah yang terkena konflik, dan sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, serta terpapar risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Sejak lama, isu prostitusi dan perdagangan seks telah menjadi topik kontroversial dalam berbagai negara. Beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Nevada di Amerika Serikat, telah melegalkan prostitusi, sementara negara lain, seperti Swedia dan Prancis, telah mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap perdagangan seks dan memperketat hukuman bagi pelaku. Meskipun legalisasi prostitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja seks, masih ada pertentangan dan kontroversi dalam pengaturannya.

Banyak LSM dan kelompok aktivis telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah yang dihadapi oleh PSK dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk organisasi yang berfokus pada hak-hak pekerja seks, seperti International Union of Sex Workers dan Sex Workers Outreach Project, serta LSM yang lebih luas yang mendukung hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Tren teknologi baru seperti internet dan aplikasi seluler telah mempengaruhi cara perdagangan seks beroperasi. Situs web kencan dan media sosial memungkinkan penjual dan pembeli seks untuk terhubung secara online, sehingga perdagangan seks menjadi lebih tersembunyi dan sulit diawasi oleh pihak berwenang. Hal ini telah memicu kekhawatiran tentang peningkatan perdagangan seks anak di internet dan eksploitasi seksual online.

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah telah menetapkan aturan untuk mengatur prostitusi dan perdagangan seks, meskipun masih ada kontroversi tentang efektivitas dan keadilan regulasi ini. Banyak negara juga telah mengadopsi hukum yang lebih ketat terhadap perdagangan seks dan menyediakan dukungan bagi para korban.

Masalah prostitusi dan perdagangan seks masih menjadi isu kompleks dan kontroversial di seluruh dunia, dan membutuhkan solusi yang beragam dan holistik. Upaya-upaya yang diperlukan termasuk dukungan untuk korban dan orang-orang yang terlibat dalam prostitusi atau perdagangan seks, penghapusan stigma sosial dan diskriminasi, penguatan aturan dan penegakan hukum yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan edukasi tentang hak asasi manusia dan risiko yang terkait dengan prostitusi dan perdagangan seks.

4.2 Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain sebagai pekerjaan dan menerima bayaran dalam bentuk uang atau barang. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi PSK, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.

Beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi PSK adalah kemiskinan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Faktor sosial seperti diskriminasi, stigmatisasi, dan kekerasan juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi PSK. Faktor psikologis seperti trauma masa lalu, gangguan mental, dan Kecanduan juga dapat berperan dalam keputusan seseorang untuk menjadi PSK.

Industri pekerja seks komersial secara umum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, kebijakan sosial, dan perubahan budaya. Beberapa negara telah melegalkan industri pekerja seks komersial, sementara negara lain melarangnya. Peraturan pemerintah dapat mempengaruhi cara industri ini diatur dan dioperasikan. Kebijakan sosial seperti program rehabilitasi dan dukungan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi industri ini secara keseluruhan.

Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan seseorang untuk menjadi PSK adalah pilihan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia harus dilakukan untuk memahami dan menangani masalah ini.

Dalam hal ini, faktor-faktor yang melatarbelakangi pekerja seks komersial dapat dilihat dari sudut pandang individu dan industri secara umum. Faktor-faktor individu meliputi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi PSK. Sementara itu, faktor-faktor industri meliputi peraturan pemerintah, kebijakan sosial, dan perubahan budaya yang mempengaruhi cara industri ini diatur dan dioperasikan. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran, juga dapat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya pekerja seks komersial.

4.3 Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan- tingkatan operasional,62 diantaranya :

a. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan,taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau,bahkan kadang kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.

c. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Jenis pekerjaan ini juga memiliki diversifikasi yang baik dalam struktur hingga operasional kerjanya. Dalam melihat fenomena di Indonesia, Hatib Abdul Kadir membagi jenis pekerjaan seks ke dalam beberapa kategori besar berdasarkan kriteria struktur dan sistem operasional, diantaranya:

a. Pekerja seks jalanan

Pekerja seks ini sering kita temui di berbagai jalanan besar di Indonesia. Sang pekerja lebih bersifat independen. Ketika terjadi interaksi tak ada perantara ketiga seperti germo maupun penjagakeamanan. Harga tubuh yang ditawarkan pun lebih miring. Hal ini karena selain tak ada tips kepada pihak ketiga secara tetap. PSK jenis ini tidak terlalu cantik serta seusia mereka terkadang lebih tua dibanding mereka yang berada di dalam lokalisasi.

b. Pekerja seks salon kecantikan

Istilah ini semacam penghalusan makna secara tersembunyi terhadap bisnis seksual yang sebenarnya mereka lakukan. Orang biasa menyebutnya dengan salon plus.

Sistem operasional pekerja seks ini pertama kali merawat serta membersihkan sang pelanggan atau pasien. Di luar itu mereka juga bersedia melayani secara ekstra seperti pijat, dan hubungan seks. Untuk mengenali salon plus dapat dilihat dari bangunannya. Salon plus biasanya berkaca gelap, ada beberapa ruang di dalamnya yang ditutup tirai.

c. Pekerja phone sex

Sistematika pekerjaan seks ini didasarkan pada jasa telepon sebagai mediator. Terdapat dua jenis kinerja dalam hal ini, pertama mereka yang biasa disebut wanita panggilan atau call girls. Transaksi awal dibuat berdasarkan janji pertemuan (kencan) yang berlanjut ke tempat tidur. Sedangkan kinerja kedua adalah seksualitas yang didasarkan pada orgasme melalui hubungan telepon (phone sex). Promosi ini sering kita temui pada berbagai majalah- majalah semi porno atau koran.

4.4 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh stigma sosial terhadap kesejahteraan pekerja seks komersial di Daerah Panjang, Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 orang pekerja seks komersial dan 5 orang yang terlibat dalam pemberdayaan pekerja seks komersial di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial yang dialami oleh pekerja seks komersial sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Pekerja seks komersial di daerah Panjang, Bandar Lampung mengalami stigma sosial yang tinggi dari masyarakat sekitar. Mereka sering dianggap sebagai orang yang tidak bermoral dan sering dijauhi oleh masyarakat. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan lain yang lebih layak dan mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan sosial yang diperlukan. Stigma sosial juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial sering merasa stres, depresi, dan kecemasan karena mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan oleh masyarakat. Beberapa pekerja seks komersial juga mengalami penyalahgunaan zat terlarang sebagai cara untuk mengatasi stigma sosial dan tekanan yang mereka alami.

Selain itu, stigma sosial juga mempengaruhi hubungan antara pekerja seks komersial dengan keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa pekerja seks komersial mengalami penolakan dari keluarga dan teman-teman karena pekerjaan mereka yang dianggap tidak bermoral. Hal ini menyebabkan mereka merasa terasing dan kesepian, yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan pekerja seks komersial dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerja seks komersial yang terlibat dalam program pemberdayaan merasa lebih dihargai dan diakui oleh masyarakat. Mereka juga memiliki akses ke layanan kesehatan dan sosial yang lebih baik.

Program pemberdayaan yang efektif harus melibatkan pekerja seks komersial dan memperhatikan kebutuhan mereka. Program juga harus memberikan pelatihan dan

keterampilan yang dapat membantu pekerja seks komersial mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap pekerja seks komersial. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan pekerja seks komersial dalam perencanaan kebijakan dan program sosial.

Dalam rangka mengatasi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial, diperlukan adanya kampanye publik yang berfokus pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja seks komersial dan mempromosikan perspektif yang lebih positif terhadap pekerjaan mereka.

Penting juga untuk mengevaluasi peran media dalam mempromosikan stigmatisasi terhadap pekerja seks komersial. Media harus memperhatikan etika jurnalistik dan mencari cara yang lebih positif dalam meliput tentang pekerja seks komersial dan isu yang terkait dengan pekerjaan mereka.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam membantu mengurangi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial. Keluarga harus mendukung dan menghargai keputusan pekerja seks komersial dalam memilih pekerjaannya. Keluarga juga harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pekerja seks komersial.

Perlu diketahui bahwa stigma sosial terhadap pekerja seks komersial bukanlah masalah yang hanya terjadi di Daerah Panjang, Bandar Lampung. Stigma sosial terhadap pekerja seks komersial terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan menjadi masalah serius dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

Dalam rangka mengatasi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial, perlu dilakukan upaya yang holistik dan melibatkan semua pihak yang terkait. Upaya ini meliputi pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan pekerja seks komersial sendiri. Pemberdayaan pekerja seks komersial dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Keberadaan PSK sudah ada sejak lama. Masalah ini terus berlanjut hingga saat ini dan semakin meluas. PSK menjadi isu sosial karena perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh individu, perilaku yang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri tetapi juga orang lain, dalam hal ini lingkungan. Bekerja sebagai PSK, baik atau tidaknya dapat dinilai dari berbagai sudut pandang.

Dari sudut pandang agama, tradisi, dan masyarakat luas, dapat dikatakan tidak baik karena dianggap masyarakat luas, dapat dikatakan tidak baik karena dianggap sebagai bagian dari perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat luas. Namun, jika Anda mengamati para wanita itu sendiri, Anda dapat menyimpulkan bahwa mereka percaya bahwa ini adalah strategi yang paling efektif untuk bertahan hidup.

Beberapa implikasi dapat ditarik dari pembahasan mengenai bagaimana stigma sosial mempengaruhi kesejahteraan pekerja seks komersial di Panjang, Bandar Lampung. Kesejahteraan mereka sangat terpengaruh oleh stigma sosial yang dihadapi oleh pekerja seks komersial di wilayah Panjang. Stigma ini menghalangi mereka untuk mengakses layanan-layanan penting dan menyebabkan pengucilan sosial, diskriminasi, dan kekerasan.

Di Kecamatan Panjang, variabel kontekstual seperti konvensi sosial, agama, budaya, dan ketidaktahuan berkontribusi terhadap stigma terhadap pekerja seks komersial. Untuk mengurangi stigma ini, perlu ada peningkatan pendidikan, kesadaran, dan perubahan sikap masyarakat. Sulit bagi pekerja seks komersial untuk mendapatkan manfaat karena terbatasnya akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Aksesibilitas dan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka harus ditingkatkan.

Agar kesejahteraan pekerja seks komersial di Kecamatan Panjang dapat meningkat, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan berjangka panjang. Hal ini

mencakup inisiatif untuk mengurangi stigma, bantuan medis spesialis, pembelaan hukum, serta instruksi dan pilihan pekerjaan dan pendidikan alternatif.

Tujuan dari penelitian ini merujuk untuk mengetahui dan memahami bagaimana stigma sosial mempengaruhi kesejahteraan pekerja seks komersial di daerah Panjang, Bandar Lampung. Dengan adanya stigma sosial yang mereka hadapi, penelitian ini dapat melihat pengalaman, kesulitan, dan dampak nyata yang dialami oleh para pekerja seks komersial.

Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk memahami aspek lingkungan, sosial, budaya, dan hukum dari stigma masyarakat yang terkait dengan pekerja seks komersial di daerah Panjang.

Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan rencana dan solusi yang tepat untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan intervensi dan kebijakan yang ditargetkan untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial. Saran-saran ini dapat mencakup metode untuk mencegah stigma, inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, dan peningkatan perlindungan hukum.

Tujuan dari penelitian ini pun dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang realitas kehidupan pekerja seks komersial di Kecamatan Panjang. Pemahaman yang lebih baik diyakini dapat membantu masyarakat untuk mendukung pekerja seks komersial secara lebih efektif dan mengurangi stigma masyarakat.

5.2 Saran

Disini saya menyarankan dalam memperbaiki dan mencegah stigma PSK berkelanjutan adalah dengan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik tentang pekerja seks komersial, termasuk dengan menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap hak asasi mereka, Mendukung program pencegahan stigma sosial dengan menggunakan media sosial, ceramah, dan acara-acara terbuka lainnya untuk mengubah persepsi public, Meningkatkan akses pekerja seks komersial untuk

mendapatkan konseling, pemeriksaan fisik, dan pengobatan penyakit menular seksual serta pilihan layanan kesehatan lainnya yang aman, privat, dan dengan harga terjangkau, Untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang komprehensif kepada pekerja seks komersial, buatlah jaringan antara LSM, pemerintah, dan kelompok-kelompok terkait lainnya, Memberikan pelatihan dan alternatif pekerjaan dan pendidikan kepada pekerja seks komersial sehingga mereka memiliki pilihan jangka panjang dan tidak terlalu bergantung pada pekerjaan seks komersial, Mendorong perubahan legislatif dan administratif yang memperlakukan pekerja seks komersial sebagai orang yang layak mendapatkan dukungan dan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai, M., Penelitian, B., Pelayanan, P., Sosial, K., Kementerian,), Ri, S., Kesejahteraan, J., No, S., & Yogyakarta, S. (n.d.). *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)*.
- Fahrudin Ali Sabri. (2022). *Kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersial di Madura*. Airlangga University Press
- K. Hairuddin, (2022). *Advokasi Penggunaan Kondom Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Rangka Mengantisipasi Penularan HIV/AIDS*. CV. AZKA PUSTAKA
- Andris Noya. (2022). *Melawan Stigma*. Penerbit Adab
- Savitri, D. (2016). *KEBERMAKNAAN HIDUP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI KONSEP DIRI*. In *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* (Vol. 18, Issue 2).
- Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Endro, J., & Lampung, B. (2019). PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ASPEK POLITIK EKSISTENSI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI EKS LOKALISASI RAWA LAUT PANJANG SELATAN BANDAR LAMPUNG M. SIDI RITAUDIN. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(8), 2655–6057.
<https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Nur, D., & Mukramin, un. (2023). Labelling Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial di Pantai Salukaili Pasangkayu. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3).
- PENGELOLAAN KESAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI MEDIA SOSIAL (Studi Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Kota Bandar Lampung di Twitter)*. (n.d.).
- Putri, R., & Syafruddin, S. (2020). Rasionalitas Beragama Pekerja Seks Komersial (PSK). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 129–137.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.113>
- Karamouzian, M., Shoveller, J., Chabot, C., & Shannon, K. (2017). *Social exclusion and injection drug use-related harm among young people who use drugs in a Canadian setting*. *Journal of Public Health*, 39(3), 506–514